

Tim Editor:  
Okto Irianto, Nikolaus Loy, Muhammad Rusdi,  
Ludiro Madu, June Cahyaningtyas, & Suryo Wibisono

# MENGAMANKAN LAUT:

## Tata Ruang dan Keamanan Maritim



KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA



PUSHANKAM  
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

**MENGAMANKAN LAUT :  
Tata Ruang dan Keamanan Maritim**

**Tim Editor:**

**Okto Irianto, Nikolaus Loy, Muhammad Rusdi,  
Ludiro Madu, June Cahyaningtyas, dan Suryo Wibisono**

**xiv + 260 halaman; 15,5 x 23 cm**

**Cover: Agung Istiadi**

**Layout: Nana N**

**ISBN: 978-602-6733-24-5**

**Cetakan pertama: November 2017**

**Diterbitkan oleh**

**PUSHANKAM UPN “Veteran” Yogyakarta dan Asisten Jasa Kemaritiman,  
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian  
Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia**

**Bekerjasama dengan**

**Penerbit Aswaja Pressindo**

**Jl. Plosokuning V/73, Minomartani,  
Sleman, Yogyakarta**

**Telp. ( 0274) 4462377**

**Email: aswajapressindo@gmail.com**

**Website: www.aswajapressindo.co.id**

# **PENGUATAN STRATEGI DIPLOMASI ENGAGEMENT-ENMESHMENT INDONESIA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN VISI POROS MARITIM DUNIA**

*Denik Iswardani Witarti*

*Anggun Puspitasari*

## **Pendahuluan**

**D**ewasa ini, kepentingan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di dunia sangat dipengaruhi oleh fenomena kemaritiman dunia. Fenomena tersebut berkaitan dengan fakta umum bahwa dua pertiga bagian dari permukaan bumi adalah lautan. Kepentingan tersebut secara spesifik dijabarkan oleh masing-masing negara ke dalam tujuan politik, ekonomi dan militer. Hal ini berdampak luas kepada upaya bangsa-bangsa di dunia dalam meningkatkan kekuatan dan keamanan teritorialnya. Konsekuensinya, strategi apapun yang dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara, harus bertumpu kepada kekuatan maritim. (Chandra Motik Yusuf, 2008)

Indonesia juga menyadari pentingnya hal tersebut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai lebih dari 18.108 pulau dan luas kurang lebih 9 juta km. Sekitar 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Indonesia juga berada di jalur persilangan perdagangan dunia. Setidaknya 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui perairan Indonesia. (Cribb, R. B., & Ford, M., 2009). Sebagai negara kepulauan yang memiliki perairan laut yang sangat luas, sektor maritim dan kelautan tentu menjadi sangat strategis bagi Indonesia jika ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial-budaya serta hukum dan keamanan.

Presiden Joko Widodo menegaskan visi maritimnya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Gagasan tersebut tertuang pada lembar Nawa Cita yang berisi program aksi

dan pidato perdananya sesaat setelah disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. (Manurung, H, 2014). Presiden Jokowi dalam pidatonya menegaskan bahwa "Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa". ("Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia", 2015) Menurut Presiden ("Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia", 2015), yaitu; Pertama, Budaya Maritim. Kedua, Pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 dan menekankan 5 (lima) pilar utama dalam Poros Maritim Dunia ("Jokowi Spells Out Vision for Indonesia's "Global Maritime Nexus", 2015), yaitu; Pertama, Budaya Maritim. Kedua, Penjagaan dan Pengelolaan Sumber Daya laut. Ketiga, Konektivitas Maritim. Keempat, Diplomasi Maritim. Kelima, Keamanan Maritim. Sesuai dengan pilar-pilar yang terkandung pada visi poros maritim dunia, Indonesia harus mempunyai agenda untuk mulai memperbaiki beberapa aspek yang merupakan syarat tercapainya visi tersebut. Indonesia antara lain perlu melakukan pembangunan kekuatan pertahanan maritim, pembangunan infrastuktur dan konektivitas maritim, penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut, pembangunan budaya maritim, dan kerjasama maritim.

Visi Poros Maritim Dunia termasuk dalam Cita Pertama, Cita Keenam dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita. Ketiga Cita tersebut saling berhubungan dengan visi yang sedang difokuskan oleh pemerintah. (Bappenas, 2016) Visi Poros Maritim Dunia pada dasarnya adalah bentuk dari kesadaran akan posisi strategis Indonesia yang merupakan bagian jalur perdagangan dunia. Perairan Indonesia secara umum memang sudah sejak lama dijadikan jalur komunikasi (*Sea Lane of Communication/SLOC*) dan perhubungan dunia (*Sea Lane of Transportation/SLOT*). (Supandi, A, 2016) Dalam hal ini, Indonesia juga mendapatkan perhatian serius dari negara-negara pengguna laut karena memiliki tiga *choke point* yang terletak di tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.

Jika diamati melalui unsur-unsur yang dimiliki Indonesia, visi Poros Maritim Dunia ini mungkin sekali akan terwujud. Namun, jika merujuk pada doktrin kekuatan maritim Alfred T. Mahan, masih terdapat beberapa syarat yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi

*maritime power*, sehingga kemudian menjadi Poros Maritim Dunia. Konsekuensi dari Poros Maritim Dunia adalah tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut yang memadai untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritim. Keamanan maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi resiko dan melawan kegiatan ilegal dan ancaman dalam ruang domain maritim dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga dan kepentingan nasional. (Willy F Sumakul, 2014)

Konsekuensi nyata dari kekurangan yang dimiliki Indonesia dalam hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan dan hambatan yang di perairan laut Indonesia dalam upayanya pencapaian Visi Poros Maritim Dunia. Permasalahan tersebut antara lain, pertama, penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia yang sering dilalui oleh kapal-kapal asing dari negara terdekat. Kedua, permasalahan teknologi yaitu Indonesia belum dapat memaksimalkan menguasai dan mengembangkan teknologi di bidang maritim. (Anthony Septian Pardosi, 2016) Masalah ketiga adalah ekonomi, pada saat ini kemaritiman belum membawa pengaruh signifikan bagi perekonomian Indonesia, ini dikarenakan Indonesia masih belum bisa menguasai kemaritimannya dan lebih bergantung kepada wilayah daratannya. Masalah keempat adalah tuntutan agar Indonesia dapat menjaga keamanan maritim kawasan dari konflik, seperti halnya yang terjadi di Laut Cina Selatan. (“Jokowi Spells Out Vision for Indonesia’s “Global Maritime Nexus”, 2015) Konflik ini melibatkan negara-negara besar dalam lingkup extraregional seperti Tiongkok dan Amerika Serikat yang nantinya akan menimbulkan ketidakpastian strategis dalam keamanan intrakawasan. Secara singkat, Indonesia harus mampu menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritim yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat diakui sebagai Poros Maritim Dunia.

Dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, dibutuhkan strategi-strategi yang baik karena pencapaiannya sangat tidak mudah. Salah satu strategi yang mungkin dilakukan oleh Indonesia adalah mengedepankan strategi diplomasi *engagement-enmeshment*. Strategi diplomasi yang memanfaatkan institusi-institusi internasional yang ada ini sejalan dengan paradigma “masyarakat internasional”. Tulisan

berikut ini hendak menjabarkan pentingnya strategi diplomasi *engagement-enmeshment* bagi Indonesia untuk mencapai visi Poros Maritim Dunia. Analisa dilakukan dengan mempertimbangkan modalitas yang dimiliki oleh Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini menjelaskan kesempatan yang mungkin dilakukan oleh Indonesia dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama yang ada demi pencapaian Poros Maritim Dunia.

### **Strategi *Engagement-Enmeshment Diplomacy***

Secara konseptual, paradigma “masyarakat internasional” berpandangan bahwa melalui organisasi dan institusi, aktor-aktor yang berperan di dalamnya dapat saling terlibat dalam hubungan yang konstruktif demi mencapai kepentingannya masing-masing. (H. Bull, 2012) Paradigma “masyarakat internasional” yang disampaikan oleh Hedley Bull, Martin Wight, dan Shaun Narine, (Thomas S.M, 2001) menyakini bahwa ketertiban dunia dapat dicapai bila disandarkan pada keseimbangan norma-norma universal, terutama budaya dan kepentingan. Walaupun hal tersebut tidak mutlak dan tidak dapat dengan sendirinya menjamin harmoni dan kerjasama internasional. Paradigma “masyarakat internasional” ini akan dapat diterapkan dengan baik pada negara-negara yang menganut ide-ide demokrasi di dalam sebuah institusi. Dalam sistem pemerintahan negara-negara tersebut, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut akan menciptakan rasa saling ketergantungan yang besar di kawasan, sehingga mereka memiliki kepentingan bersama yang tidak saling eksklusif.

Bagi para pemimpin politik nasional negara-negara yang menganut nilai-nilai dan norma-norma yang saling mengikat, keunggulan dalam bidang ekonomi dapat menjadi lebih penting dibandingkan agenda untuk menaklukkan dan mengimbangi negara lain dengan menggunakan kekuatan militer. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan kerjasama yang baik di kawasan tidak akan mengganggu *status quo* negara lain, dibandingkan dengan melakukan pengimbangan kekuatan militer - yang biayanya bisa lebih mahal daripada melakukan keterlibatan secara konstruktif dalam sebuah institusi. (Amitav Acharya, 2002)

Dalam paradigma ini, keterlibatan secara konstruktif pada institusi di kawasan akan dapat dijalin dengan strategi diplomasi. Strategi diplomasi tersebut diwujudkan dengan upaya *engagement* dan *enmeshment*. Strategi *engagement* berusaha mengembangkan ikatan politik dan ekonomi dengan sebuah negara dan membawanya pada masyarakat internasional, sehingga mengubah preferensi dan aksi para pemimpin pada kecenderungan yang lebih damai. Sedangkan strategi *engagement* dapat dipahami sebagai sebuah *constructive hedge* yang menentang agresivitas dominasi potensial sebuah negara. Strategi ini dilakukan dengan harapan kekuatan-kekuatan besar yang berpotensi sebagai negara yang mempunyai agresifitas tinggi sehingga dapat dipengaruhi atau disosialisasikan untuk mematuhi peraturan dan norma-norma internasional. (Kelly, C.R., 2004)

Strategi *engagement* dapat berjalan dengan baik setelah negara-negara yang ingin melakukan keterlibatan konstruktif melakukan strategi *enmeshment*. *Enmeshing* a number of regional powers, dimaknai dengan sebuah kebijakan umum akan mengumpulkan (*enmeshing*) kekuatan besar di regional dalam rangka mendirikan sebuah stabilitas tatanan regional. (Evelyn Goh, 2011) Perilaku *enmeshment* dari sejumlah kekuatan utama di kawasan yang bertujuan untuk mendorong sebuah struktur hierarkis keamanan yang dapat meningkatkan stabilitas regional. (Evelyn Goh, 2005) Kebijakan *enmeshment* dapat terlihat dalam dua level. Pertama adalah *Enmeshment* skala kecil, dalam level ini fokus kerjasama lebih diarahkan pada segi “*security intraregional*” di mana satu negara melakukan kerjasama strategis dengan beberapa “*major power*”. Kedua adalah *Enmeshment* skala berkembang. Dalam skala ini, pengambil kebijakan mencoba untuk merubah realitas geopolitik yang dimiliki oleh kekuatan besar untuk kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara tersebut memperluas relasi hubungan bilateral untuk mengatur stabilitas regional. Tujuan dan objek *enmeshment* berbeda-beda di tiap negara, salah satunya adalah keinginan untuk meningkatkan regional leadership, dan ambisi untuk mengubah *great power behavior*. *Enmeshment* berfungsi dalam 3 cara, melalui pencantuman legitimasi, yang kedua adalah hubungan institusionalisasi, yang ketiga adalah kerjasama keamanan. (Evelyn Goh, 2008)

Dalam konteks proses pencapaian Visi Poros Maritim yang sedang diupayakan oleh Indonesia, strategi ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat elemen-elemen yang terdapat dalam konseptualisasi tersebut sebagian besar telah terpenuhi. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dimana norma-norma dan nilai-nilai demokratis dijalankan dengan baik. Ini akan memudahkan untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan ekstraregional agar terlibat secara konstruktif di kawasan. Dengan keterlibatan konstruktif ini, Indonesia dapat memanfaatkan keadaan dengan melibatkan negara-negara di kawasan maupun kekuatan ekstraregional agar dapat mendukung pencapaian Visi Poros Maritim Dunia. *Engagement-enmeshment* ini dapat diwujudkan dengan penguatan strategi diplomasi yang baik oleh Indonesia di institusi internasional. Sesuai dengan paradigma “masyarakat internasional”, pendekatan Indonesia melalui diplomasi ini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengimbangan kekuatan militer untuk penjagaan stabilitas keamanan di kawasan. Namun, demikian penguatan strategi diplomasi harus diimbangi dengan adanya modalitas yang baik. Modalitas ini akan menjadi salah satu elemen utama untuk meningkatkan posisi suatu negara dalam melakukan praktik diplomasi. (Faizullaev, A., 2014)

## Modalitas Diplomasi Indonesia

Sebagai penguatan dalam strategi diplomasi *engagement-enmeshment* untuk mendukung pemeliharaan stabilitas kawasan, Indonesia harus memiliki dua modalitas yaitu kualitas diplomasi dan kapabilitas militer. Morgenthau (Hans J. Morgenthau, 2010) menjelaskan bahwa kualitas diplomasi merupakan salah satu faktor penting dari kekuatan nasional (*national power*) yang dimiliki negara. Kualitas diplomasi dilihat melalui bagaimana negara dapat menggabungkan faktor-faktor yang berlainan menjadi suatu keseluruhan terpadu, memberikan arah dan bobot serta dapat memaksimalkan kapabilitas yang dimiliki. Selain itu, diplomasi dapat dikatakan berkualitas apabila suatu negara dapat berperan dan memiliki inisiatif di dalam forum internasional terkait yang dimiliki, semakin besar pula kesempatan yang dimiliki negara untuk mencapai tujuannya.

Kualitas diplomasi Indonesia dapat didukung oleh dari kapabilitas militer yang dimilikinya. Kapabilitas militer ini sangat penting untuk menunjukkan wibawa suatu negara dalam partisipasi aktifnya dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan. Selain itu, kompleksitas keamanan di kawasan membuat Indonesia harus meningkatkan kapabilitas militer demi menjamin keamanan maritim sebagai salah satu konsekuensi dari Visi Poros Maritim Dunia. Namun pada kenyataannya, kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), terutama Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) masih belum sebanding dengan kemampuan negara-negara yang terlibat konflik di kawasan perairan di sekitar Indonesia, contohnya Tiongkok. (Edy Prasetyono, 2016) Anggaran militer Indonesia sampai saat ini masih tergabung dalam anggaran di Kementerian Pertahanan. Total anggaran militer Indonesia di tahun 2015 sebesar 102,3 Triliun dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 99,5 Triliun. (Informasi APBN Direktorat Jenderal Anggaran, 2016)

Pada sisi teknologi, terdapat banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) Indonesia yang membutuhkan modernisasi. Sebagian besar kapal yang dimiliki TNI AL telah digunakan selama seperempat abad, dan beberapa mengalami kerusakan. Permasalahan yang sama juga dihadapi TNI AU. Kondisi alutsista yang sebagian besar berusia 25-40 tahun menandakan bahwa postur kekuatan TNI masih jauh dari standar. (The Military Balance: East Asia and Australasia, 2016) Sebagai perbandingan, sampai tahun 2017, Indonesia hanya mempunyai 2 kapal selam dan 8 kapal penyapu ranjau laut, serta 12 kapal fregat. Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan Tiongkok yang telah mempunyai 57 kapal selam dan fregat, serta 40 kapal penyapu laut. (The Military Balance, 2017) Indonesia memang telah melakukan beberapa modernisasi di bidang pertahanan, seperti 3 kapal selam tipe 209/1400 dari Korea Selatan dan kapal tempur jenis *Sigma-class* dari Belanda. Selain itu, industri pertahanan domestik juga memproduksi dua kapal cepat KCR-40 dan KCR-60. (The Military Balance, 2017).

Akan tetapi, modernisasi yang dilakukan Indonesia, tetap belum memenuhi *Minimum Essential Force* yang dicanangkan. Pada tahun 2014, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) ketika itu, Laksamana Marsetio menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan puluhan kapal

selam untuk melindungi domain maritim. (*The Military Balance*, 2017). Disamping itu, permasalahan lainnya adalah terdapat beberapa kapal tempur hampir mendekati masa pakai. Di matra udara, tujuan dari Indonesia adalah memiliki 100 pesawat tempur menjadi tantangan tersendiri. Bahkan, pada infrastruktur, belum ada *upgrade* militer di Kepulauan Natuna. Pada matra laut, hanya dibatasi pada kapal kecil sebagai navigasi di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), yang mana di matra udara, tidak ada pesawat tempur secara permanen di Lanud Ranai. Meskipun latihan telah dilakukan sejak 1996, permasalahan utama dalam melakukan *upgrade* di Natuna adalah terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses operasional seperti bahan bakar, suku cadang, dan perbaikan. (Ristian Atriandi Supriyanto, 2015)

Berdasarkan hal ini, dapat terlihat jelas bahwa Indonesia masih belum memiliki modalitas yang mencukupi di bidang militer, terutama pada matra laut. Dengan demikian, akan sulit bagi Indonesia untuk dapat mengawasi stabilitas keamanan laut di kawasan. Oleh karena itu, Indonesia harus dapat memaksimalkan kemampuan diplomasi untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa negara di kawasan. Meskipun terdapat kendala pada pemenuhan kapabilitas militer, Indonesia mempunyai potensi dalam teknik bernegosiasi dan inisiasi dalam berdiplomasi.

Kualitas diplomasi yang dimiliki Indonesia terlihat dari peran aktif dan inisiatif yang diberikan Indonesia dalam forum diplomasi *first track* dan *second track*. Forum tersebut meliputi ASEAN, ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM), East Asia Summit (EAS), ASEAN Maritime Forum, dan The Indian Ocean Rim Association (IORA). Selain itu, peran aktif Indonesia juga terlihat dari inisiatifnya dalam mendorong terbentuknya mekanisme dalam mengelola konflik di Laut Cina Selatan melalui implementasi DOC (*Declaration on the Conduct*) dan proses pembentukan COC (*Code of Conduct*). (Heydarian, R. J., & Vu, T. M., 2017).

## Penguatan Diplomasi *Engagement-Enmeshment* dalam Institusi Internasional

Penguatan diplomasi *engagement-enmeshment* diharapkan dapat mendukung upaya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan

dengan mengambil peluang-peluang yang ada dari tiap ancaman yang mengemuka. Arsitektur keamanan regional yang sudah ada dapat dimanfaatkan untuk mendorong kerja sama keamanan maritim, khususnya dalam penanganan konflik dalam menjaga stabilitas kawasan sebagai konsekuensi dari pencapaian Visi Poros Maritim Dunia. Diplomasi *engagement-enmeshment* di bidang maritim telah dilaksanakan oleh Indonesia dan terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Peningkatan diplomasi ini sangat dipengaruhi oleh makin menguatnya keterlibatan negara-negara ekstraregional di institusi internasional guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional di kawasan perairan.

Dalam diplomasi *engagement-enmeshment*, Indonesia dapat menekankan kerjasama dengan negara-negara di dunia internasional yang dalam lingkaran konsentris (*concentric circles*) yang dibagi menjadi dua. Lingkaran pertama adalah ARF sebagai pilar utama untuk Indonesia menjalankan politik luar negerinya dengan negara-negara ekstraregional yang mencakup negara-negara yang dilalui di Samudra Pasifik. Lingkaran kedua adalah IORA, yaitu organisasi internasional yang berfokus kepada kerjasama di bidang maritim yang melingkupi negara-negara yang dilalui oleh Samudra Hindia. (Kementerian Luar Negeri RI, 2017) Dengan forum-forum tersebut, Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat kerjasama regionalnya dalam rangka menjembatani antara negara berkembang dengan negara maju yang juga mempunyai kepentingan di bidang maritim.

ARF merupakan pendeskripsi yang nyata pada strategi yang dibuat oleh Asia Tenggara dalam melibatkan negara-negara maju dalam bidang ekonomi dan politik, melalui upaya bilateral, dan melalui penggunaan institusi-institusi regional yang bersifat multilateral. Upaya ini juga berkembang ke arah hubungan ekonomi, menciptakan dialog-dialog politik dan keamanan, pertukaran antar negara, dan kerjasama serta mendirikan *military exchanges* dan hubungan kerjasama lainnya. Ini tidak hanya berpengaruh bagi negara-negara Asia Tenggara, namun juga berpengaruh pada negara-negara yang merupakan kekuatan utama di kawasan Asia Pasifik seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan India. Rosemary Foot

mempertegas hal ini dalam tulisannya *The ASEAN Regional Forum: Organizational Processes and Domestic Modes of Thought*:

*"The ARF, as a multilateral security organization embracing some 21 member states from the Asia-Pacific, has been seen as a useful means of coping with China's rise. Using a cooperative security approach, its goal is to socialize China, as those involved with the organization often state, to the point where there exists a stable expectation that the country will act as a 'responsible regional power'." (Rosemary Foot, 1998)*

Dengan *enmeshing* beberapa kekuatan besar ke dalam lembaga-lembaga dan norma-norma regional, maka hal ini mencerminkan bahwa negara-negara Asia Tenggara ingin melibatkan diri secara aktif di dalam kawasan dengan cara mengadakan hubungan baik dari segi politik, ekonomi, dan pertahanan. (Ralf Emmers, 2003) ARF adalah sebuah instrumen kebijakan keamanan regional yang memadai. Lebih dari itu, kerja ARF didasarkan atas asumsi-asumsi bahwa proses dialog ARF yang bersifat *incremental linear* akan menghasilkan perbaikan kualitatif dalam hubungan-hubungan politik di kawasan. Kerangka kerja ARF didasarkan norma *ASEAN Way* yang berlaku di Asia Tenggara. *ASEAN Way* dicerminkan dalam bentuk TAC (*Treaty of Amity Cooperation*) yang menghormati kedaulatan masing-masing anggotanya. (Shaun Narine, 2006) Perilaku para peserta ARF dipandu dan dilandaskan oleh norma-norma kooperatif tersebut. (Hiro Katsumata, 2006) Perilaku seperti inilah yang nantinya akan membangun lingkungan yang kooperatif dan stabil di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik.

ARF merupakan satu-satunya fasilitator atas wadah berkumpulnya kekuatan besar dunia dan kekuatan regional Asia. ARF dapat memadukan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia bersama Australia, New Zealand, Uni Eropa, Jepang, dan negara-negara lain yang secara arsitektur keamanan dan ekonomi regional dan dunia memiliki posisi yang penting untuk dapat terjaga stabilitasnya. Berdasarkan hal tersebut, ARF merupakan *Fulcrum* (titik pikul) dari arsitektur regional yang lebih mapan dan stabil. Dengan banyaknya keanggotaan yang dimiliki ARF ini dapat mendukung dan memudahkan terlaksananya strategi *engaging-enmeshing* antara negara-negara yang terlibat di dalamnya.

Di ARF, negara-negara anggota ASEAN mengumpulkan mitra partner sebanyak-banyaknya (Korea Selatan, Jepang, Canada, Australia, New Zealand, dan India) dalam ARF sebagai *observer* dalam penyelesaian masalah-masalah keamanan di tingkat kawasan. Aktor-aktor yang berperan di dalamnya dapat saling terlibat dalam hubungan yang konstruktif demi mencapai kepentingannya masing-masing. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara melibatkan mitra partner tersebut untuk terlibat dan mengikuti norma-norma khas ASEAN yang bersifat damai dan konstruktif.

Indonesia dapat memanfaatkan forum ini untuk melakukan diplomasi *engagement-enmeshment* dengan memasukkan agenda pencapaian Visi Poros Maritim dunia ke dalam tiap-tiap pertemuan ARF, antara lain; ketidakstabilan tatanan di kawasan yang disebabkan oleh konflik di wilayah maritim, penjagaan tol laut, serta pemanfaatan kerjasama sumberdaya kelautan. Indonesia mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang konstruktif dan sudah dinilai baik di mata internasional sehingga membuat negara-negara *superpower* merasa nyaman untuk melibatkan diri. Pemanfaatan sentralitas Indonesia dalam ARF yang juga fokus kepada isu-isu non-tradisional harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Pemberdayaan tersebut dapat berupa peningkatan *soft power* Indonesia seperti hubungannya dengan peningkatan kapasitas negara termasuk militer dalam rangka menciptakan kemampuan diplomasi yang matang. Lebih lanjut, pemberdayaan juga dapat melibatkan berbagai unsur dalam diplomasi terutama *track II* dimana komunitas profesional di Indonesia dapat membantu pencapaian Visi Poros Maritim Dunia.

Selain ARF, Indonesia juga dapat melibatkan diri dalam IORA. IORA merupakan satu-satunya organisasi regional di Samudera Hindia. Samudera Hindia merupakan lautan terbesar ketiga di dunia. Kawasan Samudera Hindia ini berperan strategis terutama untuk perekonomian dunia karena merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia dan Eropa. *Indian Ocean Rim Association* (IORA) didirikan secara resmi pada tanggal 6-7 Maret 1997. (Kementerian Luar Negeri, Indian Ocean Rim Association, 2017) Saat ini IORA beranggotakan 21 negara yaitu: Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya,

Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambique, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman. (Kementerian Luar Negeri, Indian Ocean Rim Association, 2017)

IORA juga melibatkan 7 negara mitra dialog yaitu: Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis dan Tiongkok. Terdapat juga 2 organisasi yang peninjau IORA yaitu: *Indian Ocean Tourism Organization* (IOTO) dan *Indian Ocean Research Group* (IORG). Dalam hal ini, wilayah yang terdiri dari negara-negara yang terletak disekitar Samudera Hindia. Negara-negara Samudera Hindia Rim juga bervariasi dalam hal daerah mereka, populasi dan tingkat pembangunan ekonomi. Mereka juga dapat dibagi menjadi beberapa sub-daerah (Australia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat dan Timur & Afrika Selatan), masing-masing dengan kelompok regional mereka sendiri (seperti ASEAN, SAARC, GCC dan SADC, untuk nama beberapa). (Kementerian Luar Negeri, Indian Ocean Rim Association, 2017) Dengan keanggotaan yang demikian, Indonesia dapat memanfaatkan IORA untuk strategi *enmeshing* dan *engaging* terhadap negara-negara di Samudera Hindia yang tidak tercakup dalam ARF.

Indonesia melalui diplomasi *engagement-enmeshment* dapat menjadikan Samudera Hindia sebagai perekat antara Afrika dan Pasifik dan menjadikan IORA sebagai arsitektur kawasan yang mengisi “kekosongan” (*hollowness*) di Samudera Hindia, demi menjaga urat nadi perekonomian, keamanan dan stabilitas global. (Retno L. P. Marsudi, 2017) Selama menjadi ketua di IORA sejak tahun 2015, Indonesia telah/akan menyelenggarakan sejumlah program/kegiatan lain: *3rd Indian Ocean Dialogue* (IOD); *International Symposium Future*; *IORA Guide for Investment*; *The 2nd IORA Ministerial Blue Economy Conference*; *IORAG Workshop “Intersection of Culture in Indian Ocean Region”*; *IORA Website Trade Repository*; dan *IORA-RCSTT Medicinal Focal Points Meeting*. (Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI 2016) Kepemimpinan Indonesia di IORA menjadi keuntungan

tersendiri. Indonesia dapat memperlihatkan kekuataannya serta bisa berpengaruh dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia karena peran aktifnya di Samudera Hindia.

## Kesimpulan

Dalam politik internasional kontemporer, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai geostrategi yang tinggi. Didukung dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah penduduk, serta wilayah maritim yang luas, maka Indonesia juga memiliki potensi menjadi kekuatan maritim yang kuat. Untuk menjadi Poros Maritim Dunia yang telah dicanangkan sejak tahun 2014, Indonesia harus mampu menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritim. Mengingat kapabilitas militeranya yang kurang memadai sebagai kekuatan maritim, Indonesia perlu strategi lain untuk menutupi kekurangannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melaksanakan strategi diplomasi *engagement-enmeshment* seperti yang telah dibahas dalam tulisan ini. Strategi ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengimbangan kekuatan militer dalam konteks penjagaan stabilitas keamanan di kawasan.

Strategi *engagement-enmeshment* dapat Indonesia dalam mengoptimalkan kemampuan diplomasinya dalam dua institusi besar yaitu ARF dan IORA. Dua institusi ini merupakan wadah yang baik dalam mengumpulkan (*enmeshing*) dan melakukan kerjasama yang erat (*engaging*) antara Indonesia dan negara-negara external serta kekuatan regional. Kedua institusi ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan memasukkan agenda yang dapat mengakomodir kepentingan maritimnya.

ARF merupakan pilar utama Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya dengan negara-negara di Samudera Pasifik. Di setiap pertemuan ARF, Indonesia dapat melaksanakan diplomasi *engagement-enmeshment* antara lain dalam pembahasan isu-isu nengenai ketidakstabilan tatanan di kawasan yang disebabkan oleh konflik di wilayah maritim, penjagaan tol laut, serta pemanfaatan kerjasama sumberdaya kelautan. Dengan nilai-nilai dan norma-norma yang konstruktif yang sudah dipandang baik di dunia internasional,

Indonesia dapat mudah diterima oleh negara-negara *superpower* yang ingin melibatkan diri.

Sedangkan IORA menjadi pilar bagi Indonesia untuk mendekati negara-negara di sekitar Samudera Hindia, terutama yang tidak menjadi anggota ARF. Posisi strategis Indonesia sebagai ketua IORA sejak tahun 2015 akan memudahkan Indonesia untuk merekatkan hubungan antara Afrika dan Pasifik. Apabila ini dapat dimanfaatkan dengan baik, peran aktif Indonesia dalam menjaga kestabilan kawasan akan mendukung pencapaian Visi Poros Maritim Dunia.

Berdasarkan analisa di atas, tulisan ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa strategi diplomasi *engagement-enmeshment* merupakan hal yang realistik untuk dilaksanakan dalam mencapai Visi Poros Maritim Dunia. Meskipun demikian, kualitas diplomasi Indonesia yang kini sudah cukup baik tetap harus diimbangi oleh pemenuhan kapabilitas militernya. Indonesia perlu secara serius berusaha meningkatkan modalitas kapabilitas militernya sebagai syarat untuk menjadi kekuatan maritim dunia yang disegani.

## Daftar Pustaka

- Amitav Acharya. (2002). *Regional Institutions and Security Order: Norms, Identity and Prospects for Peaceful Change*, dalam Muthiah Alagappa, ed. Asian Security Order: Instrumental and Normative Features, Stanford: Standford University Press.
- Anthony Septian Pardosi. (2016). *Potensi dan Prospek Indonesia menuju Poros Maritim*. hal. 18
- Bappenas. (2016). *Nawacita dalam dimensi Pembangunan*. Rencana Kerja Pemerintah | Kondisi Umum, Bab 2. Supandi, A. (2016). *Pembangunan Kekuatan TNI AL dalam Rangka Mendukung Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Keamanan Maritim*, 1(1).
- Böhmel, T. (2010). The effectiveness of tracks of diplomacy strategies in third-party interventions. *Journal of Peace Research*, 47(2), 167-178.

Bull, H. (2012). *The anarchical society: a study of order in world politics*. Palgrave Macmillan.

Shaun Narine, (2006), The English School And ASEAN, *The Pacific Review* (19)2: 204.

Center of Strategic & International Studies, 2014, *Jokowi Spells Out Vision for Indonesia's*

Chandra Motik Yusuf (ed.). (2008). *Maritime Dimensions Of A New World Order*, dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND HILL CO.

Cribb, R. B., & Ford, M. (Eds.). (2009). *Indonesia Beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika, 2016, *Indian Ocean Rim Association (IORA)*, Kementerian Luar Negeri RI.

Evelyn Goh. (2005). *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, Washington: East West Center.

Evelyn Goh. (2008). "Hierarchy and the role of the United States in the East Asian Security Order". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 8(3): 99.

Evelyn Goh. (2011). "Institutions and The Great Power Bargain in East Asia: ASEAN's Limited 'Brokerage' Role". *International Relations of the Asia-Pacific*. Vol. 11(3): 122.

Hans J. Morgenthau. (2010). *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hiro Katsumata. (2006). "Establishment of the ASEAN Regional Forum", *The Pacific Review*, 19 (2): 182.

Indian Ocean Rim Association. *IORA Membership*. <http://www.iora.net/about-us/membership.aspx> diakses pada tanggal 05 Maret 2017

- Kementerian Luar Negeri RI. *Kerjasama Regional*. <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/default.aspx> diakses pada tanggal 27 Maret 2017
- Kementerian Luar Negeri. *Indian Ocean Rim Association*. <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx> diakses pada tanggal 05 Maret 2017
- Manurung. H. (2014). *Indonesia's Maritime Pivot and Joko Widodo (Jokowi) Transformational Leadership*. SSRN 2510986.
- Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2017.
- PresidenRI.go.id (Presiden Ir. H. Joko Widodo). 2015. *Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia*. <http://presidenri.go.id/maritim/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html> diakses pada tanggal 04 September 2017
- Ralf Emmers. (2003). *Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF*. New York: Routledge.
- Rene L. Pattiradjawane. (2015). *South China Sea Disputes: Sovereignty and Indonesian Foreign Policy*. Singapore: RSIS.
- Ristian Atriandi Supriyanto. (2015). *Indonesia's Natuna Islands: Next Flashpoint in the South China Sea*. Singapore: RSIS.
- Rosemary Foot. (1998). "The ASEAN Regional Forum: Organizational Processes and Domestic Modes of
- Shaun Narine. (2006). the English School and ASEAN. *The Pacific Review* (19)2: 204.
- Sir Harold Nicolson. (1988). *Diplomacy*. Washington: Institute for the Study of Diplomacy.
- Thomas. S. M. (2001). Faith, history and Martin Wight: The role of religion in the historical sociology of the English School of International Relations. *International Affairs*. 77(4). 905-929.
- Willy F Sumakul. (2014). Poros Maritim dan ISPS Code Di Indonesia. *QUARTERDECK*. Vol. 8(2): 9.